

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan menjadi sektor yang vital dalam perekonomian dan mampu berkembang dengan pesat, sehingga menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia (Purnamawati, 2014). Lembaga keuangan di Indonesia berpengaruh besar untuk mendukung perekonomian dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia guna memperoleh pertolongan pendanaan dan sebagai tempat untuk menyimpan uang (Premana dkk., 2023). Lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini dapat dilihat ketika sektor ekonomi mengalami penurunan maka salah satu cara untuk mengembalikan stabilitas ekonomi yaitu dengan menata sektor perbankan (Thaibah & Faisal, 2020). Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antar pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran (Purnamawati dkk., 2014). Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk senantiasa mempertahankan kinerjanya agar tetap stabil dan sehat sehingga dapat melaksanakan setiap fungsinya dengan baik, mampu menjaga kepercayaan masyarakat, serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan moneter (Rahayu, 2022). Salah satu sektor perbankan yang memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat yaitu Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Berdasarkan (Undang-undang No.10 Tahun 1998) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan bank yang secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR (Sari, 2020). Dalam operasionalnya, BPR hanya diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BPR dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, memberikan kredit, serta menempatkan dananya pada instrumen keuangan yang aman, seperti Sertifikat Bank Indonesia atau deposito antar bank. Namun, BPR tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang menjadi kewenangan bank umum, seperti menerima simpanan giro, melakukan transfer uang, kegiatan valuta asing, atau memberikan layanan kartu kredit dan ATM. Kegiatan BPR lebih difokuskan pada pelayanan yang sederhana, mudah diakses, dan berbasis lokal, sehingga mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank-bank besar.

Sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat, BPR berperan penting dalam menunjang ekonomi lokal dengan menyediakan layanan keuangan kepada segmen pasar yang sering kali tidak terlayani oleh bank umum seperti UMKM, pelaku usaha mikro, dan masyarakat pedesaan (Luwitasari, 2024). Menurut Adnyani dkk. (2021) pertumbuhan ekonomi di Indonesia didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah UMKM. Situasi ekonomi saat ini yang bertumpu pada UMKM menjadi salah satu dasar penentuan strategi pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional (Purnamawati

& Yuniarta, 2018). Dengan demikian kontribusi BPR sangat terasa di kalangan pelaku UMKM, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan di Indonesia, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih dari 30 BPR mengalami kebangkrutan dan dicabut izin operasionalnya akibat ketidakmampuan dalam memenuhi standar keuangan serta operasional yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terdapat 8 bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia. Pada tahun selanjutnya juga tercatat 8 bank yang bangkrut, kemudian di tahun 2022 jumlahnya menyusut drastis menjadi hanya 1 bank. Pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4 bank bangkrut di Indonesia (Burhan, 2024). Sepanjang tahun 2024 total BPR yang dicabut, jumlahnya mencapai 14 bank. Pada tahun 2024 menjadi tahun yang paling banyak mencatatkan jumlah bank bangkrut sejak tahun 2020 (Dewi, 2024). Seperti yang diberitakan bali.bisnis.com pada tahun 2024 terdapat 1 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali yang mengalami kebangkrutan yaitu BPR Bali Artha Anugrah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR ini pada April 2024 karena masalah permodalan dan likuiditas yang tidak kunjung membaik. Walaupun kinerja pembiayaan BPR di Provinsi Bali menunjukkan pertumbuhan yang positif, akan tetapi hampir setiap tahun terdapat satu atau dua BPR yang di tutup karena berbagai masalah. Terhitung sejak 2019 terdapat 5 BPR yang dicabut izinnya oleh OJK di Provinsi Bali (Saputra, 2024). Fenomena ini mencerminkan adanya tekanan yang signifikan terhadap sektor BPR, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat

dan ketidakstabilan kondisi ekonomi. Dalam situasi seperti ini, entitas bisnis membutuhkan laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan dan sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan (Purnamawati & Hatane, 2022). Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi salah satu instrumen penting dalam mengidentifikasi kondisi keuangan perusahaan, sehingga langkah strategis dapat diambil untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Hal ini menjadi semakin penting mengingat sebagian besar perusahaan juga selalu mengalami lingkungan persaingan ekonomi yang terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mumpuni (Yuniarta & Purnamawati, 2023). Meskipun BPR memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nyatanya masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh BPR agar dapat menjaga keberlangsungan operasionalnya.

Tabel 1.1
Persebaran BPR di Provinsi Bali Tahun 2024

No	Kabupaten	Jumlah BPR
1	Kabupaten Buleleng	8
2	Kabupaten Jembrana	1
3	Kabupaten Tabanan	18
4	Kabupaten Badung	47
5	Kabupaten Gianyar	25
6	Kabupaten Klungkung	4
7	Kabupaten Bangli	3
8	Kabupaten Karangasem	3
9	Kabupaten Denpasar	22
Total BPR		131

(Sumber: Data BPR pada www.ojk.go.id, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah total BPR yang tersebar di Provinsi Bali tahun 2024 sebanyak 131 BPR. Dari data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Badung memiliki jumlah BPR terbanyak daripada Kabupaten lainnya yaitu sebanyak 47 BPR. Dengan memiliki total BPR terbanyak, sehingga kinerja BPR di Kabupaten Badung dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja BPR di Provinsi Bali. Jumlah BPR yang tinggi di Kabupaten Badung mencerminkan tingginya persaingan antar BPR. Persaingan ini akan berdampak pada strategi BPR dalam mempertahankan nasabah, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas kredit, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan BPR menjadi indikator penting dalam menilai keberlanjutan operasional dan kemampuannya untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Menurut Sari dkk. (2023) kemajuan teknologi saat ini membuat lingkungan bisnis berubah sangat cepat dengan persaingan yang ketat, sehingga BPR juga dituntut untuk menjalankan operasinya secara efisien dan efektif guna mempertahankan eksistensinya. Semakin berkembangnya suatu perbankan akan diiringi oleh tantangan yang harus dihadapi sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan kepercayaan (*agent of trust*). Kepercayaan merupakan bagian terpenting dari hubungan manusia dan sebagai dasar fundamental dari masyarakat yang sehat (Murniasih dkk., 2024).

Informasi mengenai kinerja keuangan bank sangat penting untuk diketahui investor sebelum menginvestasikan dananya. Situasi ini mendorong BPR untuk mempertahankan kinerja yang optimal dengan mengelola berbagai aspek keuangan. Salah satu faktor yang menentukan peningkatan kinerja perusahaan adalah sistem pengukuran kinerja yang digunakan oleh para pihak manajer dalam pengambilan keputusan strategis melalui informasi yang relevan dan komprehensif mencakup

aspek keuangan dan non keuangan, sehingga manajer dapat lebih mengetahui kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan (Purnamawati & Yuniarta, 2016). Kinerja keuangan Bank dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio. Menurut Kasmir (2019), analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Analisis terhadap laporan keuangan pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan (Masdiantini & Warasniasih, 2020). Oleh karena itu, salah satu rasio yang dapat digunakan untuk menentukan kinerja keuangan suatu bank yaitu laba atau profitabilitas. Bagi perbankan, menjaga profitabilitas agar tetap stabil bahkan meningkat merupakan hal yang sangat penting (Purnamawati & Dautrey, 2025). Menurut Sartono (2010), laba atau profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan/laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian analisis profitabilitas memiliki peran penting bagi investor jangka panjang seperti pemegang saham yang ingin mengevaluasi secara cermat keuntungan riil yang akan diterima dalam bentuk deviden.

Banyaknya BPR yang beroperasi di Kabupaten Badung dapat diasumsikan bahwa jumlah nasabah yang dilayani oleh BPR juga cukup besar, sehingga mempunyai potensi besar untuk menjangkau serta melayani lebih banyak nasabah dari berbagai sektor. Jumlah nasabah yang banyak akan berdampak pada peningkatan nilai profitabilitas yang dimiliki oleh BPR. Profitabilitas memiliki arti penting bagi suatu bank karena tingkat profitabilitas dapat menggambarkan kinerja suatu bank dalam menghasilkan keuntungan. Perkembangan Bank Perekonomian

Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung harus diimbangi dengan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan suatu bank dapat memperlihatkan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan melalui ekuitas, aset, maupun hutang. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran dari posisi keuangan bank selama periode waktu tertentu dalam hal mobilisasi dan distribusi modal, biasanya dapat dilihat dari berbagai indikator seperti rasio kecukupan modal, likuiditas, efisiensi, dan profitabilitas (Fadhilah, 2022). Pengukuran kinerja keuangan perusahaan diperlukan untuk menentukan keberhasilan sebuah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Salah satu cara yang umum untuk mengukur kinerja keuangan bank yaitu dengan menghitung rasio keuangan. Rasio keuangan yang sering kali dijadikan sebagai proksi utama dalam menilai kinerja keuangan BPR yaitu *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba sebelum pajak dari total aset yang dimiliki. Untuk menilai kinerja keuangan BPR, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kriteria penilaian ROA sebagai berikut:

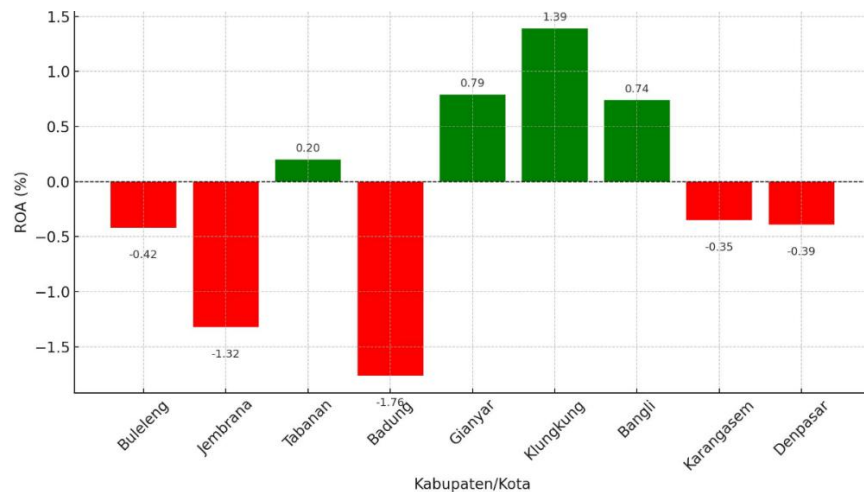
Tabel 1.2
Kriteria Penilaian ROA

Kriteria ROA	Penilaian
$ROA \geq 2\%$	Sangat Sehat
$2\% > ROA \geq 1,5\%$	Sehat
$1,5\% > ROA \geq 1\%$	Cukup Sehat
$1\% > ROA \geq 0,5\%$	Kurang Sehat
$ROA < 0,5\%$	Tidak Sehat

(Sumber: Peraturan OJK No.3/POJK.03/2022, 2025)

Kriteria penilaian ROA pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, maka semakin sehat kinerja keuangan BPR karena menandakan bahwa setiap unit aset mampu menghasilkan laba yang tinggi. Rasio ROA memberikan gambaran mengenai efisiensi manajemen dalam mengelola seluruh aset perusahaan

untuk menghasilkan laba. Dalam perbankan terutama BPR yang bergantung pada aset-aset produktif seperti kredit yang disalurkan kepada masyarakat menjadikan ROA sangat relevan karena menunjukkan seberapa efektif bank dalam mengelola dana masyarakat yang dikonversi menjadi pinjaman produktif.



Gambar 1.1
Rata-Rata ROA BPR di Provinsi Bali Tahun 2021
(Sumber: Data diolah, 2025)

Berdasarkan data rata-rata *Return on Assets* (ROA) pada Bank Perekonomian Rakyat di Provinsi Bali tahun 2021 yang ditampilkan dalam diagram tersebut dapat dilihat bahwa kinerja keuangan BPR bervariasi antar Kabupaten. Kabupaten Badung tercatat memiliki nilai rata-rata ROA sebesar -1,76% yang merupakan nilai terendah di antara wilayah lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata BPR yang beroperasi di Kabupaten Badung tidak mampu menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, bahkan mengalami kerugian. Hal ini menjadi perhatian penting karena ROA merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efisiensi dan profitabilitas lembaga keuangan. Nilai ROA yang negatif di Kabupaten Badung dapat menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam

operasional BPR, potensi masalah dalam manajemen aset, serta kemungkinan rendahnya kecukupan modal dan likuiditas. Dibandingkan dengan kabupaten lain seperti Klungkung, Gianyar, dan Bangli yang mencatatkan ROA Positif, posisi Kabupaten Badung menunjukkan kondisi keuangan yang kurang sehat. Menurut Dewanti dkk. (2022) tingginya *Return on Assets* suatu bank dapat menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja bank tersebut dikatakan baik, karena diasumsikan bahwa bank telah beroperasi secara efektif dan efisien serta memungkinkan untuk memperluas usahanya.

Tabel 1.3
Perkembangan ROA pada beberapa BPR Konvensional Di Kabupaten Badung Periode 2021-2023

No	Nama BPR	Periode	ROA (%)	(%)	Keterangan	Kondisi
1	PT BPR Cahaya Artha Bali	2021	1,22	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	1,87	0,65	Meningkat	
		2023	0,97	-0,9	Menurun	
2	PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia	2021	0,15	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	0,96	0,81	Meningkat	
		2023	0,9	-0,06	Menurun	
3	PT BPR Pasar Raya Kuta	2021	-1,77	-	-	Mengalami Fkultuasi
		2022	0,02	1,75	Meningkat	
		2023	-2,7	-2,68	Menurun	
4	PT BPR Desa Sangeh	2021	0,47	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	0,1	-0,46	Menurun	
		2023	1,85	1,84	Meningkat	
5	PT BPR Jaya Kerti	2021	5,68	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	5,85	0,17	Meningkat	
		2023	4,99	-0,86	Menurun	
6	PT BPR Urban Bali	2021	0,33	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	1,85	1,52	Meningkat	
		2023	1,66	-0,19	Menurun	
7	PT BPR Mambal	2021	3,9	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	1,47	-2,43	Menurun	
		2023	1,79	0,32	Meningkat	
8	PT BPR Saraswati Ekabumi	2021	2,43	-	-	Mengalami Penurunan
		2022	1,53	-0,9	Menurun	
		2023	1,2	-0,33	Menurun	
9		2021	0	-	-	

No	Nama BPR	Periode	ROA (%)	(%)	Keterangan	Kondisi
	PT BPR Bayudhana	2022	1,4	1,4	Meningkat	Mengalami Fluktuasi
		2023	0,95	-0,45	Menurun	
10	PT BPR Parasari Urati	2021	1,92	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	0,06	-1,86	Menurun	
		2023	0,15	0,09	Meningkat	
11	PT BPR Dinar Jagad	2021	-4,93	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	0,22	4,71	Meningkat	
		2023	0	-0,22	Menurun	
12	PT BPR Giwasa	2021	-7,75	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	-13,55	-5,8	Menurun	
		2023	1,16	14,71	Meningkat	
13	PT BPR Urip Kalantas	2021	3,18	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	1,43	-1,75	Menurun	
		2023	1,47	0,04	Meningkat	
14	PT BPR Varis Mandiri	2021	0,24	-	-	Mengalami Fluktuasi
		2022	0,72	0,48	Meningkat	
		2023	0,62	-0,1	Menurun	
15	PT BPR Mitra Bali Mandiri	2021	-0,48	-	-	Mengalami Penurunan
		2022	-3,49	-3,01	Menurun	
		2023	-3,6	-0,11	Menurun	

(Sumber: Laporan Publikasi Perbankan pada www.ojk.go.id, data diolah tahun 2024)

Fenomena yang menarik terjadi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung yaitu pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa adanya fluktuasi terhadap rasio ROA yang terjadi pada beberapa BPR selama periode 2021-2023. Secara garis besar rasio ROA mengalami penurunan di tahun 2023 yaitu terdapat 10 BPR yang mengalami penurunan. Selain itu, pada tahun 2021 terdapat 10 BPR yang belum mencapai standar ROA yang telah ditetapkan Bank Indonesia (1.5%). Hal ini juga serupa pada periode selanjutnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 11 BPR yang belum mencapai standar ROA sehingga kinerja Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Badung dapat dikatakan belum optimal, jika hal ini terus terjadi akan mempengaruhi kinerja dan kelangsungan hidup BPR.

Permasalahan penurunan dan fluktuasi pencapaian *Return on Assets* disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang diproksikan dengan (ROA) dapat dipengaruhi oleh rasio Likuiditas (LDR). Hal ini dipertegas oleh Juari & Erawati (2020) bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang tinggi mencerminkan kondisi likuiditas bank yang semakin berisiko karena sebagian besar dana yang dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit. Sebaliknya, jika semakin rendah LDR menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam menyalurkan dananya ke sektor kredit. Likuiditas merupakan ukuran kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Afisha, 2019). Pengelolaan likuiditas yang tidak optimal dapat menimbulkan tekanan terhadap kestabilan keuangan bank karena jika bank terlalu agresif dalam menyalurkan kredit hingga melampaui kapasitas likuiditasnya, maka potensi gagal bayar, penurunan kualitas aset, hingga beban operasional yang tinggi dapat terjadi. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi penurunan laba bersih dan menekan ROA.

Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan yang optimal melalui penguasaan serta pemanfaatan sumber daya secara efektif melalui penyaluran kredit yang berkualitas dan akan menghasilkan pendapatan berupa bunga kredit. Semakin tinggi LDR, maka semakin besar proporsi dan simpanan yang telah dikonversi menjadi pinjaman. Di satu sisi, hal ini dapat meningkatkan pendapatan bunga, namun disisi lain dapat menimbulkan risiko apabila tidak diimbangi dengan kualitas kredit dan manajemen risiko yang baik. Likuiditas menjadi salah satu faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan

perusahaan. Menurut Kurniawan & Samhaji (2020) umumnya rasio yang digunakan sebagai indikator penilaian likuiditas pada bank adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini dapat mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. LDR dihitung dengan membandingkan total kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga. Penelitian Assa & Loindong (2023) juga mempertegas bahwa *Loan to Deposit Rasio* (LDR) yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada pihak ketiga dalam bentuk kredit. Hal ini akan memberikan pendapatan bunga yang semakin besar dan tentunya akan meningkatkan kinerja keuangan perbankan dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif sehingga jumlah kredit macetnya kecil..

Adanya penurunan dan fluktuasi pencapaian ROA dapat dipengaruhi oleh kecukupan modal atau lebih umum dikenal sebagai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Hal ini ditegaskan oleh Aji (2022) bahwa KPMM/CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan menunjang aktiva yang mengandung risiko. KPMM merupakan indikator terhadap kemampuan suatu bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang muncul karena aktiva yang berisiko. Kecukupan modal merupakan faktor penting dalam mengembangkan suatu usaha. Modal bagi suatu bank memiliki fungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasional. Kecukupan modal dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio *Capital Adequacy Rasio* (CAR). CAR merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang

mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio CAR merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kecukupan modal bank terhadap aset yang berisiko artinya rasio ini mengukur apakah bank mempunyai cukup dana dari sumber lain atau modal sendiri untuk menutupi seluruh aset berbahayanya. Menurut Sudiartawan dkk. (2023) CAR merupakan salah satu rasio penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengetahui kecukupan modal yang dimiliki. Perhitungan CAR melibatkan penentuan rasio aset tertimbang menurut risiko terhadap modal sendiri. Semakin tinggi modal maka semakin kuat kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Dengan perlindungan modal yang cukup, bank dapat mengurangi potensi kerugian, sehingga laba bersih tidak berdampak jika terjadi kredit bermasalah. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan ROA karena laba bersih yang stabil atau meningkat.

Penurunan dan fluktuasi pencapaian ROA juga dapat dipengaruhi oleh efisiensi operasional. Hal ini dipertegas oleh Rosiyanti dkk. (2024) rasio operasional mempengaruhi profitabilitas bersama dengan rasio keuangan dan likuiditas. Efisiensi operasional perbankan merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan *output* yang maksimal yang sesuai dengan kinerja dan hasil yang diharapkan oleh bank tersebut. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional yaitu rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) (Aprianti dkk., 2021). Menurut Yulita dkk. (2020) BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. BOPO mencerminkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh

pendapatan, sehingga memberikan gambaran nyata tentang kualitas manajemen operasional bank. Semakin kecil biaya operasional yang dikeluarkan berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan bank, sehingga kemungkinan bank mengalami masalah sangat kecil. Ketika bank mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan pendapatan, maka profitabilitas dapat meningkat secara optimal, oleh karena itu rasio BOPO dapat mempresentasikan efisiensi internal bank secara menyeluruh.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap ROA. Pertama, hasil penelitian Saputri (2020) menunjukkan bahwa *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA). Penelitian Safitri (2023) juga menunjukkan bahwa LDR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan penelitian Simanihুরু dkk. (2024) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh Likuiditas (LDR) terhadap *Return on Assets* (ROA)

Capital Adequacy Ratio yang diteliti oleh Dwiningsih & Ilhami (2023) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Enteriadi dkk. (2024) menunjukkan bahwa KPMM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Kurnia & Fenitra (2024) yang menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dengan adanya *research gap* dari penelitian ini, maka perlu

dilakukan penelitian lanjut mengenai pengaruh Kecukupan Modal (CAR) terhadap *Return on Assets* (ROA).

Hasil penelitian Rahayu (2022) menunjukkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Penelitian Rosiyanti dkk. (2024) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas, sedangkan hasil penelitian oleh Shafira (2021) menunjukkan bahwa efisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Dengan adanya *research gap* dari penelitian ini, maka perlu dilakukan penelitian lanjut mengenai pengaruh efisiensi operasional (BOPO) terhadap *Return on Assets* (ROA).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Reza (2024) dengan judul Pengaruh Aspek Permodalan (KPMM), Likuiditas, dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2016-2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Reza (2024) yaitu pada variabel bebas masih menggunakan kecukupan modal/KPMM/CAR dan likuiditas serta pada variabel terikat yang diukur dengan kinerja keuangan. Sedangkan perbedaan perbedaannya yaitu terletak pada komposisi variabel independen yang digunakan, dimana penelitian ini menambahkan variabel bebas efisiensi operasional atau BOPO, tetapi tidak menggunakan variabel bebas kualitas aktiva produktif. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini menggunakan lokasi pada BPR Konvensional di Kabupaten Badung, sedangkan penelitian Reza (2024) menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini memiliki keunikan karena memfokuskan pada BPR Konvensional di Kabupaten Badung yang hingga kini belum dikaji secara spesifik dalam literatur

terdahulu. Selain itu, penelitian ini menggunakan kombinasi variabel independen LDR, CAR, dan BOPO yang secara bersamaan belum diteliti sebelumnya dalam konteks BPR di Kabupaten Badung. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ROA juga memperkuat orisinalitas dan urgensi penelitian ini.

Pentingnya memperhatikan kinerja keuangan bagi BPR menjadikan penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan guna menganalisis berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Hal ini karena kinerja suatu perusahaan pada perspektif finansial menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (Masdiantini dkk., 2024). Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan menjadi incaran investor untuk menanamkan modalnya (Purnamawati dkk., 2023). Permasalahan ini semakin mendesak mengingat data dari OJK menunjukkan adanya pencabutan izin beberapa BPR di Bali dalam lima tahun terakhir karena masalah keuangan. Hal ini menjadi perhatian serius dalam penguatan manajemen keuangan BPR di Kabupaten Badung agar tetap berkelanjutan dan kompetitif. Publikasi laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan profitabilitasnya. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Purnamawati, 2020). Kinerja keuangan bank menjadi *signal* bahwa perusahaan telah beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan menjadi aspek krusial dalam hubungan antara manajemen dengan pemilik maupun pemegang saham. Penelitian ini didasarkan pada permasalahan kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan menurunnya pencapaian *Return on*

Assets (ROA) serta adanya *research gap* antara hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten terkait dengan likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank sangat perlu dilakukan penelitian lanjutan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah adanya permasalahan *Return on Assets* (ROA) yang cenderung mengalami penurunan dan mengalami fluktuasi pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kabupaten Badung, sehingga menunjukkan bahwa kinerja BPR dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Kecukupan Modal, dan Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan pada penelitian, yakni:

1. Terdapat permasalahan terkait dengan penurunan dan fluktuasi *Return on Assets* (ROA) pada Bank Perekonomian Rakyat di Kabupaten Badung yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPR belum optimal.
2. Terdapat tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini hanya difokuskan pada BPR Konvensional di Kabupaten Badung. Kemudian, penelitian

ini hanya memfokuskan pada tiga variabel independen yaitu likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional, serta satu variabel dependen yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan rasio ROA. Data pada penelitian ini dilakukan pada periode 2021-2023 karena pada periode tersebut terjadi permasalahan kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan *Return on Assets* (ROA) pada BPR Konvensional di Kabupaten Badung.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023?
2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023?
3. Apakah Efisiensi Operasional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh Efisiensi Operasional terhadap Kinerja Keuangan BPR Konvensional di Kabupaten Badung Periode 2021-2023.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai pengaruh likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini akan dapat menambah ilmu mengenai masalah tentang kinerja BPR yang diukur dengan rasio ROA.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.
- c. Bagi Bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan BPR. Dengan memahami pengaruh likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi operasional, manajemen BPR dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha.